

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab lima berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.

5.1 Simpulan

Berdasarkan permasalahan, hasil temuan dan analisis data sebagaimana fokus kajian dalam penelitian yang berjudul “Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Tasikmalaya” diperoleh kesimpulan bahwa manajemen penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Tasikmalaya berjalan cukup baik sesuai dengan Permendikbud nomor 51 tahun 2018 meskipun di dalam prosesnya masih ditemukan terdapat kekurangan-kekurangan.

Manajemen penerimaan peserta didik baru dilihat berdasarkan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan. Perencanaan PPDB sistem zonasi mencakup aspek tujuan, landasan hukum, langkah-langkah perencanaan, penetapan persyaratan, penetapan zonasi, penetapan daya tampung, sosialisasi dan pembiayaan. Secara keseluruhan perencanaan PPDB di SMA Negeri 2 Tasikmalaya berjalan dengan baik, meskipun waktu yang tersedia cukup singkat untuk melakukan persiapan, namun berkat SDM yang handal dan manajemen yang baik menjadikan pelaksanaannya berjalan dengan lancar.

Pengorganisasian PPDB yang dilakukan oleh SMA Negeri 2 Tasikmalaya dilakukan dengan cara departementalisasi dan pembagian tugas setiap departemen atau seksi kepanitiaan. Kepanitiaan tingkat sekolah dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah atas hasil musyawarah bersama pimpinan sekolah lainnya. Kepanitiaan PPDB terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Sedangkan pembagian tugas panitia dilakukan berdasarkan pertimbangan beban kerja serta kemampuan masing-masing individu.

Kepanitiaan ini terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, seksi kesekretariatan, seksi pendaftaran, seksi pendataan, seksi pelayanan informasi/layanan pengaduan, dan seksi pengendalian. Selain kepanitiaan tersebut, Kepala Sekolah membentuk tim penguji untuk ditugaskan menyeleksi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi dalam uji kompetensi.

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Tasikmalaya dilakukan melalui alur mulai dari pendaftaran, input data, verifikasi data, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan daftar ulang. Pendaftaran dilakukan secara *online* di sekolah yang menjadi pilihan pertama pendaftar. Setiap dokumen persyaratan serta data yang diinput ke dalam sistem harus diverifikasi terlebih dahulu terkait kebenaran datanya. Pendaftaran dilakukan secara transparan antara pendaftar dan petugas panitia untuk mencegah adanya tindak kecurangan dalam prosesnya. Setelah pendaftaran dilaksanakan, selanjutnya pendaftar akan diseleksi secara otomatis oleh sistem sesuai dengan jalur yang dipilihnya, khusus untuk pendaftar jalur prestasi non-NHUN panitia menyelenggarakan uji kompetensi. Hasil seleksi ditetapkan oleh Kepala Sekolah dalam rapat dewan guru, dan diumumkan secara terbuka melalui *website* dan papan informasi yang terdapat di sekolah. selanjutnya peserta didik yang diterima wajib melakukan daftar ulang pada jadwal yang telah ditentukan.

Pengawasan/pengendalian PPDB di SMA Negeri 2 Tasikmalaya dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi setiap hari. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pihak internal dan eksternal. Pihak internal sekolah yaitu pengawasan dari kepala sekolah dan dibantu oleh seksi pengendali. Sedangkan pengawasan dari eksternal yaitu berupa pantauan dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII, Dinas Pendidikan Provinsi, bahkan media massa dan masyarakat pengguna layanan PPDB. Setiap hasil evaluasi yang dilakukan sekolah ditindak lanjuti dan dibuat laporan kepada Dinas Pendidikan.

Secara keseluruhan, manajemen PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 2 Tasikmalaya berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah. Namun terdapat kesenjangan antara kuota daya tampung

yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan peserta didik yang diterima oleh SMA Negeri 2 Tasikmalaya.

Ada pun keberhasilan PPDB di SMA Negeri 2 Tasikmalaya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sumber daya manusia yang profesional, fasilitas yang memadai, serta kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak. Begitu pun juga terdapat faktor yang dapat menghambat keberhasilan PPDB di SMA Negeri 2 Tasikmalaya yaitu adanya pendaftar yang tidak kooperatif, adanya informasi kurang tepat yang tersebar di masyarakat, dan kurangnya jumlah panitia. Namun hal-hal yang menjadi penghambat tersebut dapat diatasi dengan baik saat pelaksanaannya.

Secara umum, manajemen implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi di SMA Negeri 2 Tasikmalaya tahun akademik 2019/2020 dilakukan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Penyelenggaraannya juga sesuai dengan pedoman yang diacu yaitu Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK, dan SLB. Meskipun kebijakan zonasi dalam PPDB ini sudah diberlakukan secara bertahap sejak tahun 2017, namun sekolah-sekolah masih belum sepenuhnya siap dalam melaksanakan kebijakan ini karena tentu dalam proses implementasinya terdapat dampak positif mau pun negatif yang dialami oleh berbagai pihak, terutama bagi sekolah.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implikasi dari manajemen PPDB sistem zonasi adalah sebagai berikut.

- 1) Perencanaan PPDB sistem zonasi perlu disiapkan dengan baik, karena perencanaan merupakan langkah awal dan patokan organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Dalam hal ini diperlukan sosialisasi yang masif dan terus menerus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan tujuan dan mekanisme dari kebijakan PPDB sistem zonasi. Sehingga di kemudian hari

tidak terdapat mis-persepsi terkait kebijakan PPDB sistem zonasi yang akan menghambat tercapainya tujuan PPDB itu sendiri.

- 2) Pelaksanaan PPDB sistem zonasi tentunya tidak terlepas dari adanya permasalahan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini diperlukan pengambilan keputusan yang cepat oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan PPDB di sekolah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi agar tidak menjadi semakin besar.
- 3) Untuk mencegah hal-hal atau tindakan kecurangan dalam proses PPDB, diperlukan pengawasan PPDB yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah. Juga diperlukan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak untuk memantau keberjalanan PPDB sistem zonasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.
- 4) Pandangan masyarakat tentang sekolah favorit masih belum dapat dihilangkan sepenuhnya oleh kebijakan PPDB sistem zonasi. Maka dari itu kebijakan PPDB zonasi ini perlu disertai dengan adanya usaha pemerintah dalam pemerataan standar nasional pendidikan pada sekolah-sekolah di daerah, terutama pemenuhan standar sarana prasarana dan tenaga pendidik. Sehingga pendaftaran calon peserta didik tidak menumpuk pada beberapa sekolah tertentu saja, begitu juga agar tidak ada sekolah yang kekurangan peserta didik.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengajukan beberapa saran terkait hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Saran tersebut diharapkan dapat menjadi masukan, khususnya bagi satuan pendidikan sebagai penyelenggara PPDB, bagi peneliti, serta pihak lain yang berkepentingan untuk dapat ditindaklanjuti. Ada pun saran-saran tersebut seperti yang dideskripsikan berikut ini.

5.3.1 Bagi Dinas Pendidikan

Penulis merekomendasikan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan PPDB sistem zonasi, khususnya kepada satuan pendidikan supaya kebijakan PPDB sistem zonasi ini dapat dipahami secara lebih

komprehensif. Dinas pendidikan juga sebagai pengawas kebijakan perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB di sekolah secara berkala. Kemudian perlu diadakannya evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan yang dibuat berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan.

5.3.2 Bagi Satuan Pendidikan/Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian, berikut rekomendasi yang penulis dapat berikan kepada sekolah atau satuan pendidikan sebagai pelaksana kebijakan PPDB sistem zonasi.

- 1) Meningkatkan pemahaman terkait kebijakan PPDB sistem zonasi secara mendalam, terutama mengenai tujuan PPDB sistem zonasi agar esensi dari kebijakan dirasakan oleh semua pihak. Sehingga dalam implementasinya semua pihak dapat bersinergi dengan baik untuk mencapai tujuan utama PPDB sistem zonasi ini.
- 2) Melakukan persiapan yang matang, terutama dari segi sumber daya manusia.
- 3) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan PPDB.
- 4) Melakukan evaluasi dan analisis SWOT berdasarkan permasalahan dan kendala yang terjadi di lapangan. Harapannya dengan begitu kendala-kendala tersebut dapat dikurangi bahkan tidak terjadi lagi pada pelaksanaan PPDB tahun berikutnya.

5.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian, penulis merasa masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu bagi peneliti selanjutnya, penulis merekomendasikan untuk lebih mengembangkan dan menggali teori dari berbagai referensi tentang penerimaan peserta didik baru khususnya sistem zonasi yang secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan relevansinya. Penulis juga merekomendasikan untuk meneliti fokus kajian yang lebih spesifik, sehingga penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam. Kemudian hendaknya peneliti selanjutnya mencoba untuk melaksanakan penelitian di beberapa lembaga pendidikan yang memiliki akreditasi berbeda atau menggunakan metode penelitian berbeda sehingga peneliti dapat memperoleh hasil yang lebih variatif sebagai bahan perbandingan terkait representasi penyelenggaraan PPDB sistem zonasi di Indonesia.